

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONE**

**RENCANA
KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN**

**T
A
H
U
N**

2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala hikmah yang tercurah di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang telah diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan Rahmat dan Ridho-Nya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja sampai posisi triwulan ke II.

Total dana keseluruhan untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 6.117.184.200 (Enam Milyard seratus Tujuh Belas Juta seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja Langsung dan belanja tidak langsung yang sumber dananya berasal dari APBD (DAK – DAU).

Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah.

Watampone, Agustus 2018

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si.

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199403 2 007

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. BAB I PENDAHULUAN	1
B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II TAHUN 2018	
C. BAB III .RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	18
A Tujuan	18
B Sasaran	19
C Strategi	20
D Kebijakan	21
E Program	22
F Kegiatan.....	22
D. BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone yang telah disusun.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah salah satu satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 48 Watampone, Dinas ini mempunyai Tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Bone, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan daerah;
- b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 60% dari potensi lestarnya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 80%).

Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berdasarkan beberapa perumusan permasalahan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah pedesaan serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam.
2. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat pedesaan.
3. Penataan ruang, dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Bone untuk Pemanfaatan masih belum optimal, hal ini terkait Rencana Zonasi Wilayah pesisir di Kabupaten Bone Baru terbuat pada tahun 2015, dan untuk pemberlakuannya harus menunggu ditetapkan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
4. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan ketetapan MPR

No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 sebagai landasan operasional. Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
10. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 ini merupakan salah satu dari rangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 Perubahan ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Triwulan ke II Tahun 2018 dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang telah disusun.
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur pemda untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

5. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD evaluasi Triwulan ke II Tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh OPD bersangkutan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian MDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - e. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD, serta cap OPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN RENJA

Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan OPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Trwulan II Tahun 2018.

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Dana APBD (DAK- DAU)yang terdiri dari 11 Program dan 30 kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.6.117.184.200,-yang terdiri dari Belanja Langsung maupun tidak langsung dengan penyerapan anggaran sebesar Rp..... Atau% sampai pada triwulan ke II tahun 2018.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari APBD sebsar Rp. 265.000.000,- dengan realisasi Rp. 84.795.000 atau 32%.

Evaluasi Renja Triwulan ke II Tahun 2018 dapat dilihat pada LAMPIRAN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2018 sampai pada posisi triwulan ke II terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang diuraikan sebagai berikut : Permasalahan tersebut antara lain adalah :

- 1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai yang direncanakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada Kegiatan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yaitu Paket Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan Produksi Tangkapan Ikan masih kurang karena pagu anggaran yang disediakan kurang mencukupi untuk pelaksanaannya sehingga target pada RPJMD dan Renstra tidak tercapai;
- 2) Target Produksi Perikanan Tangkap dalam RPJMD dan Renstra terlalu tinggi karena adanya perbedaan penghitungan statistik

akibatnya capaian produksi perikanan tangkap tahun 2017 sangat rendah dibandingkan target yang ada.

- 3) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan;
- 4) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan pemanfaatan teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah;
- 5) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum digali secara maksimal misalnya Penerapan teknologi budidaya Rumput Laut *Eucheuma cottonii* dan Penerapan Teknologi Budidaya Udang dan bandeng dengan Metode CBIB.

Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang perikanan dan kelautan.
- Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan. Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan.
- Perlunya dilakukan penerapan hasil dari perencanaan zonasi kelautan dan perikanan yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone guna memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan.
- Pada tahun 2017 dan tahun selanjutnya akan dilakukan penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Analisis Program menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan pelayanan kinerja SKPD tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut: :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peisir

Pelaksanaan Program tersebut dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang indikator sasaran strategis yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB). Program tersebut terdiri atas pembinaan kelompok (KUB) , pemberian bantuan seperti alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan diatas kapal serta Sosialisasi dan pembinaan ke kelompok tentang cara penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang modern sampai penanganan ikan diatas kapal sampai tiba di darat kembali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga linear dengan pendapatan nelayan. Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai sasaran tersebut.

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk menunjang dan mendukung indikator sasaran srategis yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya dan Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan). Program tersebut terdiri atas pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, pembinaan kelompok, sosialisasi tentang cara berbudidaya yang dengan menerapkan Cara budidaya Ikan yang baik (CBIB). Pemanfaatan lokasi untuk lahan budidaya serta peluang jenis budidaya sehingga peningkatan produksi budidaya semakin

tinggi dan tingkat kesejahteraan pembudidaya juga meningkat. Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai sasaran tersebut.

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini dilakukan untuk mendukung produksi ikan olahan. Beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya pencapaian sasaran adalah mulai meningkatnya usaha pengolahan ikan dan juga adanya diversifikasi produk olahan asal ikan. Secara keseluruhan tingkat capaian dari tahun 2013-2016 produk olahan mengalami peningkatan dalam volume dan keanekaragaman produk. Peningkatan keanekaragaman produk ini mengindikasikan minat masyarakat dalam mengembangkan olahan berbahan baku ikan dan respon konsumen terhadap referensi olahan ikan cukup baik .

Potensi produk olahan yang ada di wilayah Kabupaten Bone antara lain ikan pindang, abon ikan, ikan kering (Dempo), krupuk ikan dan produk-produk lain seperti bakso ikan, nugget ikan, dan ikan asap. Produk-produk ini berasal sebagian besar dari bahan baku ikan hasil tangkapan perikanan laut dan sebagian kecil dari ikan hasil tangkapan perairan umum dan budidaya.

Peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produksi ikan olahan didukung dengan pelaksanaan kegiatan melalui program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan melalui pembinaan dan sosialisasi, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran seperti peralatan pembuat abon

ikan, pelatan pembuatan bakso ikan, peralatan pengasapan ikan, Cool Box, box gandeng ikan.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai sasaran tersebut

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- 1) Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir.
- 2) Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan (KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program).
- 3) Rendahnya SDM Nelayan /Pembudidaya
- 4) Nelayan belum memahami pentingnya berkelompok dalam pengelolaan usahanya.
- 5) Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan wilayah pesisir.
- 6) Koordinasi antara Instansi teknis terkait belum optimal
- 7) Terbatasnya Sarana danPrasarana Produksi Budidaya dan Penangkapan
- 8) Masih rendahnya peran masyarakat dalam pengendalian sumberdaya kelautan.
- 9) Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan harga yang menurun.
- 10) Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.
- 11) Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan peningkatan kerusakan habitat mangrove.
- 12) Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya.
- 13) Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
- 14) Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih rendah.

- 15) Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan mangrove.
- 16) Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada perikanan tangkap masih rendah.
- 17) Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan kapal penangkapan ikan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami standar penanganan ikan di atas kapal.
- 18) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas mutu ikan di PPI.
- 19) Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah lingkungan.
- 20) Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas Kelautan dan perikanan.
- 21) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan perikanan.
- 22) Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio penyuluh.
- 23) Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan baku menjadi barang jadi (produk).
- 24) Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masih kurang.
- 25) Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah hasil perikanan.
- 26) Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes.
- 27) Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis.
- 28) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
- 29) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
- 30) Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 31) Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik berasal dari usulan musrenbang skala prioritas, daftar longlist maupun

proposal yang diajukan oleh Kelompok akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan Tahun yang akan datang.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang berasal dari usulan musrenbang dan usulan proposal kelompok.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018).

Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir

Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:
 - Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran:
 - Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran:
 - Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan

Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran:
 - Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau dan air tawar.
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -
 - Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil perikanan

Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual.

1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan sasaran:
 - Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.
2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan, dengan sasaran:
 - Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
 - Meningkatnya keamanan produk olahan ikan

Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan sasaran:
 - Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing

Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan OPD

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan sasaran:
 - Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD, dengan sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
 - Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPD
 - Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbaru.
 - Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja OPD

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tercapainya peningkatan produksi perikanan.
- b. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan dan pengolah ikan.
- c. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.
- d. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.

- e. Tercapainya peningkatan sarana/prasarana Kelautan dan Perikanan.
- f. Tercapainya peningkatan kelembagaan ditingkat nelayan/pembudidaya ikan.

C. STRATEGI

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.
3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan.
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan.
5. Meningkatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.
6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR.
7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk.
8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).
9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
10. Mengikutkan aparatur OPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur.

12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan OPD
13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan.

D. KEBIJAKAN

Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas kapal
3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir*
4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka mengembangkan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).
5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.
6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik.
7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan produk olahan ikan.
9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan ikan.
10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing.*
11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Catatan : Tanda * Tidak Menjadi Kewenangan Kabupaten

E. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU + DAK pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Pengembangan Data/Informasi
7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Micro Kecil Menengah
9. Pengembangan Perikanan Budidaya
10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
11. Pengembangan Perikanan Tangkap

F. KEGIATAN

Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAK + DAU pada Tahun 2018 sebanyak **30 (Tiga Puluh) kegiatan yaitu sebagai berikut :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
7. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
8. Pendidikan/Pelatihan Formal
9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
13. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15. Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
16. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
17. Pembinaan Izin Usaha Pembudidaya Ikan
18. Pembinaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
19. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha mikro Kecil Menengah
20. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
21. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
22. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya
23. Pembinaan Sumberdaya Manusia Pembudidaya Pengolah dan Pemasar Ikan
24. Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan dan Lingkungan Perikanan
25. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya
26. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
27. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
28. Pembinaan Pendampingan dan Pencatatan Kapal Perikanan
29. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
30. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Renja Perubahan tahun 2018 dan Pagu Indikatif Tahun 2019 dapat dilihat pada LAMPIRAN



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan salah satu indikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas masukan dan hasil penjangkaran dari berbagai pihak yang terkait.

Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Hasil kinerja Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan. Keberhasilan Rencana Kerja ini sangat tergantung dengan penyediaan Dana baik yang bersumber dari APBD (DAK – DAU)

Watampone, Agustus 2018

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199403 2 007



**REALISASI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2017
TRIWULAN I**

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Januari			Realisasi Februari			Realisasi Maret			SISA DANA	Ket
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18
	DINAS XXXXXXXXX												
	BELANJA LANGSUNG	1,947,416,000	102,500,000	5.26	3.92	119,000,000	6.11	4.00	95,500,000	4.90	3.42	1,851,916,000	
1	Program	1,497,116,000	102,500,000	6.85	7.83	119,000,000	7.95	8.00	95,500,000	6.38	6.83	1,401,616,000	
	- Kegiatan.....	146,500,000	15,000,000	10.24	10.00	15,000,000	10.24	10.00	10,000,000	6.83	7.00	136,500,000	
	- Kegiatan.....	646,360,000	50,000,000	7.74	8.00	50,000,000	7.74	8.00	35,000,000	5.41	6.00	611,360,000	
	- Kegiatan.....	30,000,000	2,500,000	8.33	9.00	2,000,000	6.67	7.00	2,000,000	6.67	7.00	28,000,000	
	- Kegiatan.....	35,000,000	3,000,000	8.57	9.00	2,000,000	5.71	6.00	1,500,000	4.29	5.00	33,500,000	
	- Kegiatan.....	301,000,000	17,000,000	5.65	6.00	25,000,000	8.31	9.00	22,000,000	7.31	8.00	279,000,000	
	- Kegiatan.....	338,256,000	15,000,000	4.43	5.00	25,000,000	7.39	8.00	25,000,000	7.39	8.00	313,256,000	
2	Program	450,300,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	450,300,000	
	- Kegiatan.....	275,800,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	275,800,000	
	- Kegiatan.....	117,000,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	117,000,000	
	- Kegiatan.....	27,500,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,500,000	
	- Kegiatan.....	30,000,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,000,000	

Watampone, April 2017
Kepala Bappeda Kabupaten Bone

Drs. H. Abu Bakar, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19610624 198603 1 010

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Januari			Realisasi Februari			Realisasi Maret			SISA DANA	Ket
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)		

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PERIODE PELAKSANAAN : 2017

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :

Meningkatnya Produksi, Mutu dan Nilai Jual Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produk Olahan Ikan

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%			
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
			Urusan Pilihan																								
			Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan																								
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,283,836		100	1,625,755	100	302,528	100	441,496	-	-	-	-	200.00	744,025	2.000	45.76	200.00	744,025	200.0	22.7	BAPPEDA	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis)	3	390,726.40		3	160,000	3.00	45,611	3	24,851	-	-	-	-	6.00	70,461	2.000	44.04	6.00	70,461	200.0	18.0		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Berfungsi (%)	77	30,525.50		77	27,500	77.00	14,775	77	5,885					20,660	75.13								
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%)	100	659,595.00		100	250,000	100.00	45,600	100	94,400	-	-	-	-	200.00	140,000	2.000	56.00	200.00	140,000	200.0	21.2		
				Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang diberikan Honor/Jasa Atas Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Selama 1 Tahun (Orang)	90	450,000.00		90	250,000	90.00	45,600	90	94,400	-	-	-	-	180.00	140,000	2.000	56.00	180.00	140,000	200.0	31.1		
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kenyamanan bekerja	5	175,000,000.00		1	3,500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	57,998.45		3	25,000	3.00	2,580	3	3,420	-	-	-	-	6.00	6,000	2.000	24.00	6.00	6,000	200.0	10.3		
			Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar untuk pemecahan masalah-masalah daerah	100	512,828.40		100	250,000	25.00	65,760	25	95,058	-	-	-	-	50.00	160,818	0.500	64.33	50.00	160,818	50.0	31.4		
				Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang diberi tugas Dinas dalam Daerah dan luar daerah selama 1 tahun (Orang)	90	750,000.00		90	250,000		65,760		95,058						160,818		64.33						
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan alat tulis, barang cetakan, penggandaan dan makanan serta minuman selama 1 tahun (%)	100	850,000.00		100	110,000		16,843	-	28,425	-	-	-	-	-	45,267	41.15	-		45,267	-	5.3		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				1.21				121.4	16.8		
Predikat Kinerja																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			FALSE	SANGAT RENDAH		
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85	1,175,772.75			85	650,070		108,173		64,556	-	-	-	-	172,730	-	26.57			-	-	BAPPEDA	
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	8	244,204.00			5	100,000		-		59,716					59,716	-	59.72			-	-		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	5	33,000.00			5	100,000		80,000		-					80,000	-	80.00			-	-		
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebeleur (unit)	4	100,000.00			2	150,000		5,000		-					5,000	-	3.33			-	-		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab sedang/Berat (Unit)	2	105,000.00			1	500,000		3,187		10,783					13,970	-	2.79			-	-		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%)	100	228,941.25			100	200,000		19,986		53,774					73,760	-	36.88			-	-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	34.88			-	-	
Predikat Kinerja																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
3			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	8	135,000.00			4	150,000		30,261		22,125	-	-	-	-	52,386	-	34.92			-	-	BAPPEDA	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	8	135,000.00			5	150,000		30,261		22,125					52,386	-	34.92			-	-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	34.92			-	-	
Predikat Kinerja																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
4			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)	5	213,373.24			5	200,000		1,755		9,640	-	-	-	-	11,395	-	5.70			-	-	BAPPEDA	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)	5	213,373.24			7	200,000		1,755		9,640					11,395	-	5.70			-	-		
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	5.70			-	-	
Predikat Kinerja																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 /5 x 100%		16	17	
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5			Program Pengembangan Data/Informasi	Updating Dokumen Database tindak lanjut intervensi program dan kegiatan	1	105,000.00			1	100,000		-	2,520		-	-	2,520	-	2.52			-	-	BAPPEDA				
			Pengumpulan,Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Updating Dokumen Database tindak lanjut intervensi program dan kegiatan (Dokumen)	1	105,000.00			1	100,000		-	2,520				2,520	-	2.52			-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	2.52						
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
6			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB) dan POKDAKAN	24	3,940,263.11			23	67,349		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	BAPPEDA				
			Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi sertifikat tanah (Persil) dan bermitra dengan Bank	1550	324,791.32			100	100,000		22,730	11,393				34,123		34.12									
				Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi Asuransi Perlindungan	5,500	-			2500	-		-	-						#DIV/0!									
				Jumlah penerbitaan/ Pencatatan Usaha Budidaya dan pengangkut ikan hidup /asal ikan	200	105,000.00			100	100,000		2,315	2,670				4,985		4.99									
				Jumlah Penerbitan ijin Usaha budidaya skala besar (> 5Ha)	8	105,000.00			5	50,000		1,800	2,475				4,275		8.55									
				Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi (KUB)	24	280,834.60											-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#DIV/0!	#DIV/0!						
Predikat Kinerja																					#DIV/0!	#DIV/0!			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
7			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Fasilitasi Promosi Usaha Produk Perikanan (Jenis)	2	275,000.00			550,000		21,010	65,770		-	-	-	86,780	#DIV/0!	15.78			-	-	BAPPEDA				
			Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Perikanan (Jenis)	2	525,000.00			2	550,000		21,010	65,770				86,780	-	15.78			-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#DIV/0!	15.78						
Predikat Kinerja																					#DIV/0!	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
8			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	355,663	1,210,307			310,316	812,927		18,487	12,395		-	-	30,882	-	3.80			-	-	BAPPEDA				
				Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	532	-			522	-									#DIV/0!									
			Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang terlegalitasi Tanahnya / bermitra (Persil Tanah ,Premi Asuransi)	200	210,000			100	100,000		2,715	13,600				16,315	-	16.32			-	-					
				Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang didampingi melalui Penguatan Kelembagaan (Pokdakan)	10	420,000			5	200,000		2,760	103,915				106,675		53.34									
			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pembudidaya dan /Pokdakan terlatih (Orang)	60	210,000			30	100,000		1,740	25,000				26,740	-	26.74			-	-					
				Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Produksi (Pokdakan)	84	151,025			20	5,000,000		59,805	684,788				744,593		14.89									
				Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang terbina dan terdampingi melalui pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Pokdakan)	10	210,000			5	100,000		6,274	58,686				64,960		64.96									
			Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Benih Ikan BBI (Ekor)	1,252,815	161,207			1,000,000	700,000		18,487	12,395				30,882	-	4.41			-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	#DIV/0!						
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	#DIV/0!			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
9			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	334,998	13,992,366			40,117	40,650,000		118,601	554,933		-	-	673,534	-	1.66			-	-	BAPPEDA				
				Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap (KUB)	238	-			228	-																		
			Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang terlatih (Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan) (Orang)	60	210,000			30	100,000		3,540	14,800				18,340	-	18.34			-	-					
				Jumlah penerbitaan/ Pencatatan tanda kapal nelayan (Unit)	200	231,000			100	100,000		3,720	47,655				51,375											
			Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (KUB)	145	10,317,619			10	40,200,000		106,315	481,725				588,040	-	1.46			-	-					
			Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap	Optimalnya Operasional PPI (%)	100	303,423			100	250,000		5,026	10,753					-	6.31			-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	6.94						
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
10			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Prosesntase Peningkatan ekononomi Pokdakan melalui pendekatan Pengembangan Kawasan Budidaya (%)	60	870,000			50	700,000		-	3,342		-	-	3,342	-	0.48			-	-	BAPPEDA				

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 /5 x 100%		16	17	
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penataan pengembangan kawasan budidaya, baik di air laut, payau maupun air tawar	2	420,000			1	200,000		-		3,342						3,342									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan di Kawasan Pengembangan Budidaya (Paket)	9	1,150,000			4	500,000		-		3,342						3,342	-	0.67			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		#REF!	#REF!									
Predikat Kinerja																		#REF!	#REF!				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM)																		#REF!	#REF!				#REF!	#REF!				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM....)																		#REF!	#REF!				#REF!	#REF!				
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																												
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																												
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																												
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERIKUTNYA :																												

disusun
..... Tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE

(DRS. H. ABUBAKAR, MM)

disetujui,
..... Tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE

(DRS. H. ABUBAKAR, MM)

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :

Meningkatnya Produksi, Mutu dan Nilai Jual Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produk Olahan Ikan

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD 1/4 Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD 1/4 Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
							I		II		III		IV																
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x 100 %	14 = 6 + 12	15 = 14 / 5 x 100%	16	17													
2	05	17	09	Penyenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Penyenggaraan Promosi Produk Perikanan (Jenis)	2	275,000,000	2	125,880,000	2	72,000,000	-	3,000,000	-	6,150,000	-	9,150,000	-	12.71	2	135,030,000	100	49.1						
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	12.71		100	49												
Predikat Kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH												
8	2	05	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1,207,839	1,973,334,414	1,282,261	11,829,323,269	310,316	2,027,239,000	50,000	296,740,000	79,108	219,865,000	-	129,108	516,605,000	42	25.48	1,411,369	12,345,928,269	117	626	DKP				
					Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	532												-											
					Jumlah Pembudidaya / Pokdakan yang didampingi melalui kegiatan kelompok (Pokdakan)	10	420,000,000	5	263,400,000	5	79,800,000	-		2	19,150,000		2	19,150,000	40	24.00	7	282,550,000	70	67					
2	05	20	03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Produksi (Pokdakan)	84	151,025,000	335	9,055,039,528	20	1,420,200,000	-	273,335,000	15	135,402,000		15	408,737,000	75	28.78	350	9,463,776,528	417	6,266					
2	05	20	04	Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan	Jumlah Produk Benih Ikan BBI (Ekor)	1,252,815	772,309,414	1,765,000	2,190,814,088	1,252,815	275,239,000	60,000	6,850,000	72,000	6,333,000		132,000	13,163,000	11	4.78	1,897,000	2,203,977,088	151	285					
2	05	20	05	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya / Pokdakan yang terlatih/latihan Tanahnya / Pembudidaya Ikan	200	210,000,000	300	119,765,500	100	83,800,000	-	10,050,000	-	13,700,000		-	23,750,000	-	28.34	300	143,515,500	150	68					
2	05	20	06	Pembinaan Sumberdaya Manusia Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar	Jumlah Pembudidaya dan / Pokdakan terlatih (Orang)	60	210,000,000	30	69,644,398	30	62,000,000	-	1,750,000	-	2,900,000		-	4,650,000	-	7.50	30	74,294,398	50	35					
2	05	20	07	Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan dan Lingkungan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang terbiasa dan terdampingi melalui pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Pokdakan)	10	210,000,000	5	130,659,755	5	106,200,000	-	4,755,000	-	42,400,000		-	47,155,000	-	44.40	5	177,814,755	50	85					
Rata-rata capaian kinerja (%)													26.92	22.97		148.01	1,134.57												
Predikat Kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		FALSE	FALSE												
9	2	05	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	378,876.7	11,062,042,470	175,388	8,010,033,322	43,878	1,197,640,000	-	151,023,000	-	201,028,000	-	-	352,051,000	-	29	175,388	8,362,084,322	46	76	DKP				
					Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	238		238		238		238		238			476												
2	05	21	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang terlatih (Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan) (Orang)	60	210,000,000	60	156,647,000	30	39,700,000	-	5,000,000	40	31,800,000		40	36,800,000	133	93	100	193,447,000	167	92					
2	05	21	06	Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (KUB)	145	10,317,619,000	241	7,608,287,000	10	1,053,940,000	-	134,115,000	-	160,250,000		-	294,365,000	-	28	241	7,902,652,000	166	77					
2	05	21	07	Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap	Optimalnya Operasional PPI (100)	100	303,423,470	100	137,574,322	100	26,500,000	100	5,988,000	100	5,228,000		100	11,216,000	100	42	100	148,790,322	100	49					
2	05	21	09	Pembinaan, Pendampingan dan Pencatatan tanda kapal nelayan	Jumlah pemberdayaan/ Pencatatan tanda kapal nelayan (unit)	200	210,000,000	300	107,525,000	100	77,500,000	-	5,950,000	-	7,750,000		-	9,670,000	-	31	300	117,195,000	100	51					
Rata-rata capaian kinerja (%)													58.33	43.86		145.72	67.12												
Predikat Kinerja													RENDAH	SANGAT RENDAH		FALSE	SEDANG												
10	2	05	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Pemeliharaan ekonomi Pokdakan melalui pendekatan Pengembangan Kawasan Budidaya (%)	110	1,570,000,000	4	676,207,760	5	823,100,000	-	175,682,884	2.00	14,815,000	-	-	190,497,884	40	23	6	866,705,644	5.5	55.2	DKP				
2	05	24	01	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penatan pengembangan kawasan budidaya, baik di air laut, payau maupun air tawar	2	420,000,000	1	50,000,000	1	823,100,000	-	175,682,884	-	14,815,000		-	190,497,884	-	23	1	240,497,884	50.0	57.3					
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan di Kawasan Pengembangan Budidaya (Paket)	9	1,150,000,000	3	626,207,760	4	-	-	-	2			2	-	50	#DIV/0!	5	626,207,760	55.6	54.5					
Rata-rata capaian kinerja (%)													30	#DIV/0!		37	56												
Predikat Kinerja													SANGAT RENDAH	#DIV/0!		SANGAT RENDAH	RENDAH												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													6,018,289,000		932,620,280		883,158,394		-		-	1,815,778,680							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 10)													49	#DIV/0!		125	221												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 10)													SANGAT RENDAH	#DIV/0!					FALSE	FALSE									
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																													
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																													
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																													
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERIKUTNYA :																													

disusun
Watampone, 30 Juni 2018
An: KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
SEKRETARIS,

diستuji,
..... Tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE

A. YUSMAN ANWAR, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640606 198603 1 036

(DRS. H. ABUBAKAR, MM)

NO	Kode	Usuran/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Rencana perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PG yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PG Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PO s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PG Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PO s/d Tahun 2018 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							I	II	III	IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10÷11	13 = 12/7 x 100 %	14 = 6 + 12	15 = 14 / 5 x 100%	16	17				
	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				

||

2017								2018	
TW I	TW II	TW III	TW IV	2,013	2,014	2,015	2,016	TW I	TW II
45,610,733	70,461,496	113,624,553	180,153,457	57,438,638	83,652,121	90,152,800	134,271,910	102,162,624	102,162,624
14,775,000	20,660,000	28,429,000	36,765,000	6,500,000	5,900,000	9,999,800	24,999,100	13,167,500	13,167,500
45,600,000	140,000,000	240,800,000	315,100,000	103,440,000	165,620,000	181,840,000	201,990,000	147,340,000	147,340,000
-	-	-						-	
1,800,000	2,965,000	2,965,000	3,430,000	77,382,000	2,450,000	2,965,000	67,843,000	2,310,000	2,310,000
2,580,000	6,000,000	13,585,000	19,965,000	12,395,000	7,360,000	7,000,000	12,110,000	11,190,000	11,190,000
65,760,025	160,818,431	279,032,062	389,703,892	102,975,760	110,079,558	218,822,589	232,960,313	149,572,877	149,572,877
-	-	-						-	
16,842,750	45,267,250	92,406,650	152,809,100	-	54,921,200	74,010,000	108,200,000	49,765,600	49,765,600
									32,340,000
3,187,000	13,969,500	23,969,500	239,419,500	25,000,000	41,419,000	42,930,000	367,772,000	20,265,000	9,200,000
19,986,188	73,760,186	110,084,355	190,548,721	41,700,000	71,485,709	104,172,796	145,738,818	53,720,752	20,265,000
									53,720,752
30,261,000	52,386,000	52,386,000	102,386,000	-	-	-	-	-	-
1,755,000	11,395,000	43,132,000	77,800,000	34,930,000	43,300,000	49,085,000	88,186,000	22,680,000	22,680,000
	2,520,000	15,780,000	25,921,000	-	-	49,928,000	56,195,000	700,000	700,000
22,730,000	34,123,447	40,668,447	76,299,947	44,840,000	39,125,000	37,476,600	37,794,455	55,052,443	55,052,443
-				-	-	-	-	-	
									59,728,000
2,315,000	4,985,000	22,245,000	33,700,000	-	-	-	-	18,280,000	18,280,000



2017								2018	
TW I	TW II	TW III	TW IV	2,013	2,014	2,015	2,016	TW I	TW II
21,010,000	86,780,000	96,780,000	125,880,000	-	-	-	-	9,150,000	9,150,000
322,999									
219,108									
2,760,000	106,675,000	113,735,000	263,400,000	-	-	-	-	19,150,000	19,150,000
59,805,000	744,592,800	2,280,095,148	2,452,075,148	2,738,515,000	1,915,500,500		1,948,948,880	408,737,000	408,737,000
18,487,000	30,882,000	36,494,000	57,462,000	105,321,000	353,814,000	987,664,500	686,552,588	13,163,000	13,163,000
2,715,000	16,315,000	35,882,000	67,800,000	-	36,160,000	37,605,500	46,000,000	23,750,000	23,750,000
1,740,000	26,740,000	29,120,000	69,644,398	-	-	2,971,149,600	-	4,650,000	4,650,000
6,274,055	64,959,755	68,139,755	130,659,755	-	-	-	-	47,155,000	47,155,000
3,540,000	18,340,000	72,840,000	95,100,000	61,547,000			-	36,800,000	36,800,000
106,315,000	588,040,000	1,475,790,000	1,604,610,000	1,592,935,000	1,301,142,000	1,342,400,000	1,767,200,000	294,365,000	294,365,000
5,026,000	15,779,000	22,078,000	27,500,000	49,582,000	10,343,000	20,689,500	29,459,822	11,216,000	11,216,000
3,720,000	51,375,000	104,135,000	107,525,000	-	-	-	-	9,670,000	9,670,000
-			4,925,000						
-	3,341,760	314,774,760	857,584,661	-	-	-	-	190,497,884	190,497,884
-				-	-	-	-		
504,594,751	2,393,673,732	5,728,971,230	7,708,167,579						
			1,815,778,680						
			1,815,778,680						
			4,925,000						
			1,820,703,680						

||

2017

2018

TW I

TW II

TW III

TW IV

2,013

2,014

2,015

2,016

TW I

TW II

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
PERIODE PELAKSANAAN 2018

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :

Meningkatkan Produksi, Mutu dan Nilai Jual Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya dan Produk Olahan Ikan

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x 100 %	14 = 6 + 12	15 = 14 / 3 x 100%	16	17															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 / 3 x 100%		16	17	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Urusan Pilihan																									
2	05		Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan																									
1	2	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.126.673,754	64	3.255.205,238	100	1.006.935,000	100	217.053,252					100	217.053,252	89	21,56	64	3.472.258,490	100	111,1	DHP		
	2	05	01	02	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik (jenis)	3	390.726,400	3	545.668,926	3	235.200,000	3	57.045,107					3	57.045,107	100	24,25	3	602.714,033	100	154,3		
	2	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Berfungsi (%)	77	30.525,500	77	84.163,900	77	20.000,000	77	8.395,500					77	8.395,500	100	41,98	77	92.559,400	100	303,2		
	2	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (%)	100	458.575,024	100	987.990,000	100	133.510,000	100	49.180,000					100	49.180,000	100	14,75	100	1.017.170,000	100	154,2		
					Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang diberikan Honor/Jasa Kita Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Selama 1 Tahun (Orang)	90	450.000,000	90	-	90	-	90	-					90	-	100	-	90	-	100	-			
	2	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelengkapan bekerja	5	175.000,000	18	154.070,000	1	2.500,000	-	2.155,000					-	2.155,000	-	86,20	18	156.225,000	360	89,3		
	2	05	01	15	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perikanan	Terbayarnya bahan baku dan peralatan perikanan: undangan	3	57.998,450	2	58.830,000	2	15.000,000	2	3.750,000					2	3.750,000	100	25,00	1	62.580,000	44	107,9		
	2	05	01	23	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Presentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%)	100	512.828,400	100	1.054.542,112	100	266.867,500	100	69.029,745					100	69.029,745	100	25,87	100	1.123.571,857	100	219,1		
					Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang diberi tugas dinas dalam Daerah dan luar daerah selama 1 tahun (Orang)	90	400.000,000	90	-	90	-	90	-					90	-	100	-	90	-	100	-			
	2	05	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan: alat tulis, barang cetakan, penggantian dan makanan serta minuman selama 1 tahun (%)	100	450.000,000	100	389.940,300	100	133.857,500	100	27.497,900					100	27.497,900	100	20,54	100	417.438,200	100	92,8		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		89	27			120	123					
Predikat Kinerja																		TINGGI	SANGAT RENDAH			FALSE		FALSE				

2	2	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	85	526,568,750	85	1,270,186,544	85	504,450,000	25	29,631,150							25	29,631,150	25	6	55	1,299,817,694	65	247	DHP		
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	5	120,000,000	5	45,000,000	3	45,000,000	-	-							-	-	-	-	10	102,386,000	250	76	DHP		
					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi (Unit)	1	25,000,000	1	25,000,000	-	25,000,000	-	-							-	-	-	-	10	102,386,000	250	76			
					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Presentase Fungsi Gedung Kantor Dinas (%)	95	152,627,500	2	716,940,500	1	239,450,000	-	-							2	716,940,500	2	469	2	716,940,500	2	469			
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bertanggung Kendaran Bermotor (%)	100	228,943,250	100	553,646,044	100	195,000,000	100	29,631,150							100	29,631,150	100	15	100	583,277,194	100	255			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50.00	SANGAT RENDAH		7.60		55.6	323.7				
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH		FALSE				
3	2	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	4	134,615,000	10	102,386,000	4	22,125,000	-	-							-	-	-	-	10	102,386,000	250	76	DHP		
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	4	134,615,000	10	102,386,000	4	22,125,000	-	-							-	-	-	-	10	102,386,000	250	76			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-		-		250.00	76.06				
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			FALSE		TINGGI				
4					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terevisi sesuai aturan, tepat waktu dan akurat/bal (jenis)	5	213,373,245	5	293,301,000	7	62,200,000	7	5,900,000							7	5,900,000	100	9	7	299,201,000	140	140	DHP		
					Pemusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Riwayat Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terevisi sesuai aturan, tepat waktu dan akurat/bal (jenis)	5	213,373,245	7	293,301,000	7	62,200,000	7	5,900,000							7	5,900,000	100	9	7	299,201,000	140	140			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100.00	SANGAT RENDAH		9.49		140.00	140.22				
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			FALSE		FALSE				
5	2	05	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Updating Dokumen Database tidak lanjut intervensi program dan kegiatan	2	55,000,000	2	132,044,000	1	20,000,000	-	-							-	-	-	-	2	132,044,000	100	240	DHP		
					Pengumpulan,Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan	Updating Dokumen Database tidak lanjut intervensi program dan kegiatan (Dokumen)	2	55,000,000	2	132,044,000	1	20,000,000	-	-							-	-	-	-	2	132,044,000	100	240			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-		-		100.00	240.08				
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			FALSE		SANGAT RENDAH				
6	2	05	15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUR) dan POKDAMKAN	131	434,793,320	227	315,536,002	23	282,600,000		53,590,000							-	-	-	-	18.96	369,126,002.00	-	84.9	DHP		
					Jumlah Kelompok Masyarakat yang didampingi		131														-	-	-	-							
					Pembiayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Pembiayaan yang mendapat akses/ Asuransi Perlindungan (Pesisir) dan bermitra dengan Bank	1500	324,793,320	400	235,536,000	100	152,000,000		44,700,000							44,700,000		99.41	400	280,236,002	25.8	86.3				
					Jumlah Nelayan yang mendapat akses/ Asuransi Perlindungan		5,500	-	8,453	-	2,500	-	1,500	-	1,500	-	60	-	9,953	-	181.0	-	9,953	-	181.0	-	92.9				
					Pembiayaan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha budidaya skala besar (> 5ha)	8	55,000,000	-	46,300,000	5	94,600,000	-	4,810,000		-	4,810,000	-	5.08	-	51,110,000	-	5.08	-	51,110,000	-	92.9				
					Pembiayaan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil	Jumlah penerbitan/ Pencatatan Urahan Budidaya dan pengangkutan ikan hidup /sai ikan	200	55,000,000	100	33,700,000	100	36,000,000	-	4,080,000		-	4,080,000	-	11.33	100	37,780,000	-	11.33	100	37,780,000	50.0	68.7				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					12.00	11.46				64.19	61.98				
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH		RENDAH				
7	2	05	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Fasilitasi Promosi Usaha Produk Perikanan (jenis)	2	275,000,000	2	125,880,000	2	72,000,000		3,000,000							-	-	-	-	4.17	2	128,880,000.00	100	46.9	DHP	

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD 1/4 Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD 1/4 Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
							I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.						
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 /5 x 100%		16	17												
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
2	05	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Perikanan (Jenis)	2	275,000,000	2	125,880,000	2	72,000,000	-	3,000,000		3,000,000	-	4.17	2	128,880,000	100	46.9											
Rata-rata capaian kinerja (%)																					4.17			100	47							
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH							
8	2	05	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1,207,839	1,973,334,414	1,282,261	11,829,323,269	310,316	2,027,239,000	50,000	296,740,000	79,108	-	90,000	-	103,891	-	322,999	296,740,000	104	14.64	1,605,260	12,126,063,269	133	614	DKP			
						Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan)	532																									
2	05	20	02		Pendampingan Pada Kelompok Tani Perikanan Budidaya	Pengujian Kelengkapan (Pokdakan)	10	420,000,000	5	263,400,000	5	79,800,000											5	263,400,000	50	63						
2	05	20	03		Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana produksi (Pokdakan)	84	151,025,000	335	9,055,039,538	20	1,420,200,000		273,335,000									273,335,000	19.25	335	9,328,374,538	399	6,177				
2	05	20	04		Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produk Benih Ikan BBI (Ekor)	1,252,815	772,309,414	1,765,000	2,190,814,088	1,252,815	275,239,000		6,850,000									6,850,000	2.49	1,765,000	2,197,664,088	141	285				
2	05	20	05		Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidayaan / Pokdakan yang terintegrasi Tanahny / Benihnya (Perai Tanah, Prem, Asuransi)	200	210,000,000	300	119,765,500	100	83,800,000		10,050,000									10,050,000	11.99	300	129,815,500	150	62				
2	05	20	06		Pembinaan Sumberdaya Manusia Pembudidayaan, Pengolah dan Pemasar	Jumlah Pembudidayaan dan / Pokdakan terlatih (Orang)	60	210,000,000	30	69,644,398	30	62,000,000		1,750,000									1,750,000	2.82	30	71,394,398	50	34				
2	05	20	07		Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan dan Lingkungan Perikanan	Jumlah Pembudidayaan Pokdakan yang terbiasa dan terdampingi melalui pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan (Pokdakan)	10	210,000,000	5	130,659,755	5	106,200,000		4,755,000									4,755,000	4.48	5	135,414,755	50	64				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	6.84		189.95	1,114.05							
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		FALSE	FALSE							
9	2	05	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	378,876.7	11,062,042,470	175,388	8,010,033,322	43,878	1,197,640,000	-	151,023,000	-	-	-	-	-	-	-	151,023,000	-	13	175,388	8,161,056,322	46	74	DKP			
						Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	238		238		238																					
2	05	21	01		Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang terlatih (Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan) (Orang)	60	210,000,000	60	156,647,000	30	39,700,000		5,000,000									5,000,000	-	13	60	161,647,000	100	77			
2	05	21	06		Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (KUB)	145	10,317,619,000	241	7,608,287,000	10	1,053,940,000	-	134,115,000									134,115,000	-	13	241	7,742,402,000	166	75			
2	05	21	07		Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengembangan Perikanan Tangkap	Optimalnya Operasional PPI (%)	100	303,423,470	100	137,574,322	100	26,500,000	100	5,988,000									100	5,988,000	100	23	100	143,562,322	100	47		
2	05	21	09		Pembinaan, Pendampingan dan Pencatatan tanda kapal nelayan	Jumlah pemberitaaan/ pencatatan tanda kapal nelayan (unit)	200	210,000,000	100	107,535,000	100	77,500,000		5,930,000									5,930,000		8	300	113,645,000	210	49			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25.00	13.89		129.05	62.11							
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		FALSE	RENDAH							
10	2	05	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Prosentase Peningkatan ekonomi Pokdakan melalui pendektanan Pengembangan Kawasan Budidaya (%)	110	1,570,000,000	4	676,207,760	5	823,100,000	-	175,682,884	-	-	-	-	-	-	-	175,682,884	-	21	4	851,890,644	3.6	54.3	DKP			
2	05	24	01		Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penatan pengembangan kawasan budidaya, baik di air laut, payau maupun air tawar	2	420,000,000	1	50,000,000	1	823,100,000	-	175,682,884									175,682,884	-	21	1	225,682,884	50.0	53.7			
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan di Kawasan Pengembangan Budidaya (Paket)	9	1,150,000,000	3	626,207,760	4	-	-	-									-	-	#DIV/0!	3	626,207,760	33.3	54.5			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	#DIV/0!		29	54							
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH	#DIV/0!		SANGAT RENDAH	RENDAH							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												6,018,289,000		932,620,286						-		932,620,286										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 10)														28	#DIV/0!				113	224												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 10)														SANGAT RENDAH	#DIV/0!			FALSE	FALSE													
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERIKUTNYA :																																

disusun
Watampone, 30 Mei 2018
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONE

U. WAHIDA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19481130 199403 2 007

dietujui,
..... Tanggal
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE

(DRS. H. ABUBAKAR, MM)

NO	Kode	Usuran/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2018 (Akhir Periode Rencana perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2018 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	X	Rp.	K	Rp.							K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8÷9×10÷11		13 = 12/7× 100 %		14 = 6 ÷ 12		15 = 14 / 5 × 100%		16	17	
				K	Rp.	K	Rp.	X	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		

TW I	TW II	TW III	TW IV	2,013	2,014	2,015	2,016	
21,010,000	86,780,000	96,780,000	125,880,000	-	-	-	-	3,000,000
	322,999							
	219,108							
2,760,000	106,675,000	113,735,000	263,400,000	-	-	-	-	-
59,805,000	744,592,800	2,280,095,148	2,452,075,148	2,738,515,000	1,915,500,500		1,948,948,880	273,335,000
18,487,000	30,882,000	36,494,000	57,462,000	105,321,000	353,814,000	987,664,500	686,552,588	6,850,000
2,715,000	16,315,000	35,882,000	67,800,000	-	36,160,000	37,605,500	46,000,000	10,050,000
1,740,000	26,740,000	29,120,000	69,644,398	-	-	2,971,149,600	-	1,750,000
6,274,055	64,959,755	68,139,755	130,659,755	-	-	-	-	4,755,000
3,540,000	18,340,000	72,840,000	95,100,000	61,547,000			-	5,000,000
106,315,000	588,040,000	1,475,790,000	1,604,610,000	1,592,935,000	1,301,142,000	1,342,400,000	1,767,200,000	134,115,000
5,026,000	15,779,000	22,078,000	27,500,000	49,582,000	10,343,000	20,689,500	29,459,822	5,988,000
3,720,000	51,375,000	104,135,000	107,525,000	-	-	-	-	5,920,000
-			4,925,000					
-	3,341,760	314,774,760	857,584,661	-	-	-	-	175,682,884
-				-	-	-	-	
504,594,751	2,393,673,732	5,728,971,230	7,708,167,579					
			932,620,286					
			932,620,286					
	4,925,000		932,620,286					
	937,545,286							

TW I

TW II

TW III

TW IV

2,013

2,014

2,015

2,016

83	194,501	54	26,178.3
59	241,303	80	33,641.3
55	242,980	96	34,628.7
30	280,478	55	36,400.0
227	959,262	285	130,848.3

15,000,000	20	2,727.1	477,750,000
16,500,000	21	2,781.6	525,525,000
18,150,000	21	2,837.3	578,077,500
19,965,000	22	2,894.0	635,885,250
65,000,000	23	11,239.9	2,217,237,750
134,615,000	24		
	131		
788,500,000			91
867,350,000	11	70,513.4	91
954,085,000	11	72,609.2	
1,049,493,500	11	74,767.6	349,800,000
3,659,428,500	11	76,990.6	384,780,000
	20	40,117.4	423,258,000
129,364	20	43,878.5	465,583,800
133,346	84	378,876.7	1,623,421,800
137,455			
141,695			
310,316			
355,663			
1,207,839			
100,097,000	25,000,000	60,000,000.0	50,000,000
110,106,700	27,500,000	66,000,000.0	70,000,000
121,117,370	30,250,000	72,600,000.0	77,000,000
133,229,107	33,275,000	198,600,000.0	84,700,000
146,552,018	35,000,000		281,700,000
161,207,219	151,025,000		
772,309,414		50,000,000.0	
		10,000,000.0	1,845,000,000
		11,000,000.0	893,515,000
		12,100,000.0	
		83,100,000.0	

Dinas Kelautan dan Perikanan

1,845,000,000	
893,515,000	228,194,800
2,738,515,000	188,055,000
	416,249,800

98,871,000	
6,450,000	428,189,000
105,321,000	2,444,459,600
	98,500,000
	2,971,148,600

26,122,100	
12,799,800	216,278,000
15,999,300	81,585,000
54,921,200	134,693,000

485,591,500	389,946,625
1,429,909,000	226,900,000
1,915,500,500	616,846,625
25,014,000	
328,800,000	
353,814,000	629,179,800
	1,319,769,080
205541050	1,948,948,880
558,440,650	
763,981,700	

| Kabupaten Bone